

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sebuah media wajib yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pangan, apalagi bagi masyarakat yang matapencahariannya sebagai seorang petani seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Melihat dari sejarah, tidak hanya masyarakat Indonesia, pada era abad ke 18 antara tahun 1650 – 1800 para pemilik, ahli tanaman dan peternakan di Eropa, terutama di Inggris sudah mendiskusikan cara yang terbaik untuk mengolah pertanian dan meningkatkan hasil panen. Para ilmuwan meneliti cara menternakkan hewan, mengolah tanah dan meningkatkan hasil panen, berbagai kota dan industry tumbuh semakin pesat, sementara pertanian menghasilkan lebih banyak uang. Ketika keuntungan meningkat, para pemilik tanah semakin giat melakukan penelitian dan eksperimen, semua ini yang mendorong terjadinya revolusi pertanian, begitu juga di Indonesia banyak kota-kota tumbuh begitu pesat dampak dari petanian dan perkebunan, ternyata pertanian menghasilkan banyak uang bagi para pelaku-pelakunya membuat banyak orang, perusahaan swasta lokal maupun asing serta BUMN mendulang banyak rupiah dari pertanian dan perkebunan.

Dilihat dari sejarah pertanian, terjadi perubahan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi era tahun 1836 – 1913 yang melahirkan revolusi

industry yang telah mengubah wajah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern, di tandai dengan munculnya pusat-pusat industri, seperti kota Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Seperti halnya revolusi yang lain, Revolusi Industri juga membawa akibat yang lebih luas dalam bidang ekonomi, agraria, sosial dan politik, baik di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain. (Ensiklopedia Sejarah dan Budaya 2009: 340).

Sebelum terjadi Revolusi Industri, masyarakat Eropa (khususnya Inggris) hidup dalam tatanan system ekonomi agraris. Dalam bidang sosial, masyarakat hidup dalam sistem feodalis yang mana golongan bangsawan, tuan tanah dan gereja sebagai orang berkuasa dengan hak istimewa. Sedangkan petani sebagai penggarap tanah milik penguasa sehingga dengan adanya revolusi industri melahirkan revolusi pemikiran, revolusi sosial, revolusi agraria dan revolusi lainnya.

Revolusi Agraria sendiri merupakan perubahan dalam cara bercocok tanam, baik soal tanah, cara maupun jenis produksi dan tenaga kerja, dari cara tradisional ke modern. Agraria di sini meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan alam, yang digantikan peran iptek dalam meningkatkan produksi bahan pangan.

Revolusi agraria sendiri menyebabkan beberapa Dampak yaitu:
(http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri).

a. Dampak Positif

1. Semakin majunya teknologi, yaitu dengan ditemukannya penemuan-penemuan ilmiah. Misalnya : Pupuk Kimia dimana ditemukan unsur hara (Unsur makro dan Mikro), sementara selama ini petani hanya menggunakan pengalaman-pengalaman dalam bercocok tanam, seperti hanya memanfaatkan kotoran, kompos tetapi tidak mengetahui apa yang terkandung didalamnya.
2. Terdongkraknya produksi yaitu dengan tercukupinya unsur hara dengan cepat dan instant. (menggunakan NPK; Nitrogen untuk pertumbuhan, Pospor untuk tinggi, pembungaan dan Kalium untuk Fisiologis atau adaptasi).
3. Efisiensi dalam perawatan karena system yang dipakai adalah monokultur sehingga terjadi spesialisasi tanaman, hasilnya adalah kualitas dan kuantitas menjadi lebih baik.
4. Hemat dalam pemanfaatan tenaga kerja, yang sebelumnya untuk menggunakan pupuk alami membutuhkan tenaga kerja yang banyak, kini diganti dengan pupuk kimia yang hanya memerlukan jumlah tenaga kerja yang sedikit.

b. Dampak Negatif

1. Tanah semakin tidak subur karena walaupun unsur Makro (unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar dalam pupuk kimia) terpenuhi, tetapi

banyak unsur lain yang tercuci, sebab hakikat pupuk kimia adalah pupuk tunggal.

2. Produksi yang dihasilkan di masa yang akan datang akan semakin buruk dan buruk.
3. Hama cenderung mudah menyebar, sebab system pertanian yang diterapkan adalah monokultur sehingga akan mudah sekali terjadi penularan hama atau penyakit diakibatkan penanaman tanaman yang sejenis.
4. Penghasilan pertanian hanya terfokus pada satu jenis tanaman dan sangat melimpah. Hal ini menyebabkan harga-harga pasaran akan cenderung merosot. Meskipun kualitas yang dihasilkan bagus, tetapi karena melebihi kebutuhan, maka harga cenderung menjadi jatuh.

Dampak lain dari Revolusi Pertanian adalah Revolusi Sosial yaitu suatu gerakan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial. Revolusi sosial yang terjadi di Inggris adalah suatu gerakan dari masyarakat yang bertujuan untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang dianggap tidak baik menuju ke tingkat kehidupan yang lebih baik. Inilah inti dari Revolusi Sosial yang terjadi di Inggris pada abad 19 yang melahirkan banyak tokoh-tokoh sosial yang progresif revolusioner di dalalam pemikiran mereka, mencoba menyumbangkan analisis pemikirannya untuk membuat tatanan hidup yang lebih baik, tokoh tersebut seperti; Thomas Hobbes, Karl Marx, Frederik Engels, Max Weber, Ralf Dahrendorf , Randall Collin, Lewis Coser dan lain-lain.

Revolusi industri di Eropa sendiri secara langsung berdampak bagi Indonesia, dimana Indonesia pada waktu itu masih dalam cengkraman kolonialisme Belanda. Berdasarkan letak geografis Indonesia yang bersifat tropis, menyebabkan Indonesia memiliki ciri-ciri, curah hujan yang tinggi, memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi dan Indonesia memiliki dua musim yakni musim kemarau dan penghujan.

Berada di iklim tropis, Indonesia menjadi negara yang subur dimana keanekaragaman flora dan fauna dapat di temui. Indonesia adalah salah satu negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena masih banyaknya hutan yang luas sehingga Indonesia di juluki sebagai paru-paru dunia, hutan di Indonesia sendiri terdiri dari hutan hujan tropis, hutan musim, hutan savana dan hutan bakau, Indonesia sangatlah cocok di jadikan tempat pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga menjadikan masyarakat Indonesia bergerak di bidang agraris. Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia disebut dengan istilah "*Mega biodiversity*" atau "keanekaragaman mahluk hidup yang tinggi" umumnya dikenal sebagai *Indomalaya* atau Malesia berdasarkan penelitian bahwa 10 persen tumbuhan, 12 persen mamalia, 16 persen reptil, 17 persen burung, 25 persen ikan yang ada di dunia hidup di Indonesia, padahal luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas Bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo.

Karena kekayaan alam yang melimpah, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu banyaknya bangsa lain yang mencoba menguasai Indonesia, sehingga Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia lainnya. Indonesia dari zaman dahulu merupakan negara yang terkenal kaya akan hasil alamnya yang melimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan menguasai sumber daya alamnya untuk memperkaya bangsa mereka. Dengan semangat, *Gold, Glory, Gospel* dan perkembangan ilmu pengetahuan serta jatuhnya kota Konstantinopel ke bangsa Turki mendorong penjelajahan bangsa barat untuk menancapkan imperialisme dan kolonialisme ke penjuru seantero dunia.

Di bawah sistem *Cultuurstelsel* oleh Johannes van den Bosch (*Sistem Penanaman*) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Indonesia seperti dibuat laboratorium pertanian dimana banyak ujicoba penanaman tumbuhan yang dibawa dari daratan Afrika dan Amerika seperti kopi, sawit, karet dan lain-lain, dilakukan sehingga lahir perkebunan-perkebunan besar. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem ini dihapus, Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan Beretika, yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia-Belanda.

Ketika Belanda berkuasa di Indonesia pada tahun 1901 ratu Belanda Wilhelmina mengatakan "*Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda*", pidato tersebut menjadi awal

kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan politik Etis atau dikenal dengan politik balas budi, adapun tujuan politik Etis yaitu:

1. *Edukasi*: menyelenggarakan pendidikan
2. *Irigasi*: membangun sarana dan jaringan pengairan
3. *Transmigrasi*: mengorganisasikan perpindahan penduduk

Dampak dari Transmigrasi adalah banyaknya perpindahan penduduk dari pulau Jawa yang padat ke pulau – pulau lainnya yang belum padat seperti Sumatra dan Kalimantan. Selain pada era kolonisasi Belanda, Transmigrasi juga di laksanakan pada era orde baru berkuasa, berikut ini daftar transmigrasi yang dilaksanakan di Sumatra khususnya di Provinsi Lampung.

Penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi Lampung pertama kali dimulai pada tahun 1905 yang dikenal dengan program kolonisasi dengan penempatan pertama sejumlah 155 KK transmigran yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah ke Kampung Bagelen Gedong Tataan, 25 km sebelah barat kota Bandar Lampung. Dari tahun 1905 hingga tahun 1943 di Provinsi Lampung telah ditempatkan transmigran sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa di kawasan Gedong Tataan, Gadingrejo, Wonosobo Lampung Selatan, dan kawasan Metro, Sekampun, Trimurjo dan Batanghari di Lampung Tengah. Berdasar keberhasilan penempatan pertama tersebut kemudian pada tanggal 12 Desember 1950, sebanyak 23 KK dengan 77 jiwa transmigran ditempatkan di Provinsi Lampung melalui pola Trans Tuna Karya, Trans Bencana Alam dan Trans Pramuka. Tanggal 12 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Pada periode 1950 – 1969 penempatan transmigran ke Provinsi Lampung 53.263

KK atau sebanyak 221.035 jiwa dengan Pola Tanaman Pangan. Total perpindahan penduduk ke Provinsi Lampung melalui program transmigrasi dari tahun 1905 hingga tahun 1969 sejumlah 104.273 KK atau 432.755 jiwa.

Sumatra sendiri memiliki wilayah yang sangat luas, melebihi luas pulau Jawa sedangkan populasi masyarakat Sumatra lebih sedikit dari pulau Jawa, dari runtutan sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah banyak di jajah bangsa lain menimbulkan banyak dampak, dengan di jalankanya program politik balas budi yang di jalankan Belanda, Edukasi, Trasmigrasi dan Irigasi melahirkan perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lainnya khususnya Sumatera dan banyaknya perkebunan besar yang diciptakan oleh pihak Kolonial Belanda. Setelah berjalannya waktu timbullah permasalahan mengenai aspek legal tanah, yaitu berupa: Tuntutan ganti rugi tanah oleh masyarakat adat. Tuntutan ganti rugi tanah oleh penduduk setempat. Tumpang tindih lahan. Okupasi Lahan Transmigran.

Tabel 1.1. Kasus pertanahan berdasarkan wilayah

No	Wilayah Konflik	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Luas Lahan (ha)
1	Lampung Utara	11	4.347	23.902,50
2	Lampung Timur	11	15.240	60.335,00
3	Lampung Selatan	24	34.065	98.500,15
4	Lampung Barat	5	38.700	61.500,00
5	Lampung Tengah	10	8.265	46.005,88
6	Tulang Bawang	17	22.457	93.630,00
7	Way Kanan	8	9294	43.571,00
8	Tanggamus	1	86	50,00
9	Bandar Lampung	4	1284	470,00
	Jumlah	91	133.738	427.964,53

Sumber: Departemen pendidikan dan informasi dewan rakyat Lampung DRL 2005

Lampung pernah dibuat gempar dengan adanya kasus konflik Agraria di Mesuji yang sampai memakan korban jiwa, dan ternyata konflik Mesuji hanyalah salah satu dari banyaknya perkara pelik konflik agraria. Perkara konflik agraria di Lampung kini menumpuk, nyaris tidak ada yang terselesaikan dengan baik hingga saat ini.

Menumpuknya perkara agraria di Lampung terjadi akibat ketidak seriusan dan ketidak mampuan pemerintah untuk menyelesaikannya. Padahal, di Lampung sudah dibentuk tim koordinasi penyelesaian konflik lahan. Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung kewalahan untuk mengatasi maraknya konflik agraria. Setiap tahun muncul 10 kasus besar baru. Hampir 60 persen dari sekitar 350.000 hektar luas wilayah hutan register di Lampung kini ditinggali perambah. (Indra Firsada, Direktur LBH Bandar Lampung; KOMPAS, Senin 28/5/2012).

Desa Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sebagai seorang petani, tanah memiliki nilai sosial, ekonomi yang sangat tinggi tetapi sebagian dari masyarakat Sendang Ayu dan masyarakat lain yang memiliki tanah di Desa Sendang Ayu tepatnya di Tanah eks Sertifikat HGU PT. Sahang Bandar Lampung (SBL) di Desa Sendang Ayu, Surabaya, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung terjadi perselisihan, sengketa dan konflik antara petani dengan PT. Sahang Bandar Lampung sudah terjadi sejak lama dan tak urung terselesaikan.

Warga mengajukan beberapa tuntutan yaitu: 1) Warga menuntut pengembalian tanah yang selama ini dikuasai oleh PT. Sahang Bandar Lampung, 2) Warga menuntut pemerintah daerah melalui BPN segera memetakan tanah dan segera mengeluarkan sertifikat tanah dan memberikan kepada warga masyarakat yang memiliki hak.

Tabel 1.2 Jumlah masyarakat yang terlibat konflik (data 1970).

Nama Kampung	Jumlah Masyarakat Terlibat Konflik	Keterangan
Kampung Sendang Ayu	230 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Kampung Surabaya	112 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Kampung Padangratu	25 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Jumlah	367 Jiwa	

Sumber: Partai Rakyat Demokratik : 2010

Aksi masyarakat juga terjadi pada tanggal 23-24 juni 2010 Rakyat menggelar Aksi massa atau unjuk Rasa ke KAKANWIL BPN Provinsi Lampung dan menghasilkan :

1. Pencabutan Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) No. 522/01/D.4/BU/2009 tanggal 26 juni 2009 yang diberikan kepada PT. Sahang Bandar Lampung.
2. Pernyataan Bupati Lampung Tengah dan KAKANWIL BPN Provinsi Lampung yang tidak akan memproses perpanjangan HGU PT. Sahang Bandar Lampung sebelum menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Akan membentuk TIM TERPADU PROVINSI.

Aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat kampung Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu sudah beberapa kali dilakukan, berikut ini tuntutan yang disampaikan masyarakat.

Aksi-aksi kolektif tersebut mereka lakukan untuk memperjuangkan 5 (lima) hal:

1. Pemkab Lampung tengah mewakili pemerintah NKRI Berkewajiban menegakkan ketentuan UUD 1945 Ayat 3; UU Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA 1960) Pasal 2 Ayat 4 : UU Nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan akan hak atas tanah, berbagai peraturan dan keputusan Menteri yang pada prinsipnya meletakkan posisi pemerintah/ PEMKAB LAMTENG menentukan dan menetapkan substansi dari perbuatan Hukum Publik tersebut terlebih dahulu/ Tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lainnya, baik dari hal yang positif yakni:” perbuatan Hukum Publik yang memeberikan suatu hak kepada orang-perorangan “, dan dalam hal yang negative yakni: “Perbuatan Hukum Publik ysng mengambil/ mencabut Hak orang perorangan.
2. PT. SBL/LSP dan Perseorangan tersebut sebelumnya dalam aktifitasnya telah bertentangan dengan Pancasila sila: 1 s/d 5 bahkan melanggar uu No. 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan, Melanggar PP No. 40 tahun 1996 Tentang HGU, HGB, HPAT, Lembar Negara RI Tahun 1996 N0.58 Dan Tambahan Lembar Negara –RI No.3643.

3. Tanah HGU Seluas 238,0630 Ha² a/n PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG sesudah dan sebelum masa HGU berakhir; berkategori terlantar sesuai PP-RI No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kemudian ditegaskan menjadi “tanah yang langsung dikuasai Negara”, didalam surat BPN-RI No. 4031/25.2-600/X/2011 yang disahkan oleh kepala Deputi V BPN RI Pada tanggal 26 Oktober 2011.
4. Adanya keputusan kepala BPN no 25 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan permohonan penegasan tanah Negara menjadi pengaturan penguasaan tanah/ *Land Reform* dan peraturan kepala BPN RI tahun 2011 Pasal 72 Tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus petanahan.
5. Perusahaan dan perseorangan tersebut sebelumnya disinyalir telah melakukan tindakan penggelapan sesuai KUHP Pasal 372 dan telah melakukan perbuatan curang sesuai KUHP Pasal 382 bis, pasal 385 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Serta tidak membayar pajak.

Dari berbagai usaha yang dilakukan masyarakat ternyata sampai sekarang belum juga terselesaikan, pemerintah sepertinya hanya memberikan keputusan tanpa segera mengeksekusi atau menindak lanjuti keputusan mengenai permasalahan tersebut dan sekarang kasus tersebut masih terkatung-katung tanpa ada kejelasan dari pemerintah atas sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan.

1.2. Fokus Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian ini adalah ” Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sendang Ayu, Surabaya, Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah .”
Pertimbangan yang mendasari pemilihan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terindikasi pelanggaran Hukum dan HAM yang dilakukan oleh perusahaan terhadap warga.
2. Peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik.
3. Dampak konflik Agraria terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Sendang Ayu, Surabaya, Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka secara operasional permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1.** Bagaimanakah dinamika Konflik Agraria desa Sendang Ayu dan Surabaya Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.
- 1.3.2.** Apakah Penyebab konflik.
- 1.3.3.** Apakah Pemicu terjadinya konflik.
- 1.3.4.** Bagaimana upaya penyelesaian konflik.
- 1.3.5.** Bagaimana dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui:

1.4.1. Bentuk dinamika konflik, Penyebab Konflik, Pemicu terjadinya konflik, Upaya penyelesaian konflik, dan Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat.

1.4.2. Untuk dijadikan supplement bahan ajar mata pelajaran PPKn standar kompetensi “Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan penegakan hak asasi manusia (HAM) materi kelas VII ”, Pokok Bahasan, Memecahkan masalah pelanggaran HAM di lingkungan masing-masing, Penanganan kasus HAM, Sikap menghargai HAM, Upaya perlindungan HAM, Mengetahui bentuk kasus pelanggaran HAM dan Upaya penegakan HAM, Pada Kurikulum 2013.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

Mengembangkan konsep ilmu sosial, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan yang terkandung didalam materi, PPKn Standar Kopetensi, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam materi kelas VII Kurikulum 2013.

2. Secara Praktis :

Menjadikan referensi bagi akademisi dan masyarakat luas yang membutuhkan, dalam mengkaji konflik agraria di Lampung, khususnya mengetahui akar permasalahan konflik agraria.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada pada lingkup kajian ilmu sosial dimana akan membahas mengenai dinamika konflik Agraria dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sendang ayu dan Surabaya Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.

1.6.1. Ruang Lingkup Ilmu

Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan kajian keilmuan IPS yang masuk kedalam tradisi IPS sebagai penelitian mendalam dan IPS sebagai kritik kehidupan sosial, selain kedalam ilmu IPS penulis juga menggunakan kajian ilmu pendidikan yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karena didalamnya terdapat materi yang membahas mengenai hak asasi manusia. Menurut Sapriya (2009: 13-14) mulanya ada tiga tradisi *Social studies* yang mengalami perkembangan menjadi lima tradisi, kelima tradisi *Social studies* tersebut yaitu:

1. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan.
2. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.
3. IPS sebagai penelitian mendalam.
4. IPS sebagai kritik kehidupan sosial.
5. IPS sebagai pengembangan pribadi individu.

Dalam pembelajaran tertentu saja tidak dapat secara langsung menyampaikan kalimat tradisi tersebut sebagai materi. Oleh karena itu, dalam kurikulum pembelajaran IPS kelima tradisi tersebut dikembangkan menjadi sepuluh tema. Kesepuluh tema menurut NCSS (1984) dapat dikembangkan sebagai berikut: (1) Budaya, (2) Waktu, kontinuitas dan perubahan, (3) Orang, tempat dan lingkungan, (4) Individu, pengembangan dan identitas, (5) Individu kelompok dan lembaga, (6) Kekuasaan wewenang dan pemerintahan, (7) Produksi, distribusi dan konsumsi, (8) Science, teknologi dan masyarakat, (9) Koneksi global dan, (10) Cita-cita dan praktek warganegara.

Didalam materi PPKn Standar Kompetensi, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam materi kelas tujuh, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan melihat secara langsung mengenai konflik serta hak setiap warga negara. Melalui kajian ilmu sosial diharapkan konflik yang terjadi dapat terselesaikan dan ditemukan solusi jitu dalam menyelesaikan kasus Agraria ini agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

1.6.2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemilik Tanah, dan Pendamping Masyarakat yang terlibat didalam konflik Agraria.

1.6.3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik Agraria ini bisa terjadi.

1.6.4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendang Ayu dan Surabaya Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.

1.6.5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.